

COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM PEMBANGUNAN SISTEM PENGAIRAN PEDESAAN
DI DESA BAKTI AGUNG KECAMATAN POSO PESISIR UTARA

Ahmad Rifai^{1)*}, Syahrudin Hattab²⁾, Agusta Sri Astuti³⁾

¹Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
ahmadrifai00024@gmail.com

²Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
syahrudinhattab88@gmail.com

³Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
agustasriastuti@gmail.com

ABSTRAK

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam collaborative governance untuk pembangunan sistem perairan di Desa Bakti Agung Poso Pesisir Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, Studi kepustakaan dan dokumentasi. Untuk mengumpulkan data informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Teori yang digunakan adalah Ratner (2012) dimana ada tiga indikator yaitu Identifikasi Hambatan dan Peluang, Strategi Debat Untuk Mempengaruhi, Merencanakan Tindakan Kolaborasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang baiknya sistem pengairan pedesaan yang di sebabkan dalam identifikasi hambatan dan peluang masih yang kurang tepat, komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam Perbaikan bendungan yang rusak masih belum tersalurkan dengan baik, Serta pengambilan keputusan yang perlu di pertimbangkan dengan tepat dalam proses kolaborasi agar dapat mencakup kebutuhan dan masalah yang sedang di hadapi para petani. mencegah kerusakan berulang sistem pemeliharaan rutin diperlukan agar sistem pengairan terawat. Peningkatan infrastruktur pengairan harus mencakup saluran yang lebih baik dan bersih untuk mengurangi resiko tersumbat oleh sampah dan sedimentasi.

Kata kunci: Collaborative Governance, Pembangunan, Pengairan Pedesaan

ABSTRACT

Collaborative governance is a method of governance that directly involves stakeholders outside the government or state, oriented towards consensus and deliberation in the collective decision-making process aimed at creating or implementing public policies and public programs. This research aims to understand how community involvement in collaborative governance can contribute to the development of the water system in Bakti Agung Village, North Poso Coastal Region. This study employs a qualitative descriptive approach and utilizes purposive sampling techniques. Data collection methods include observation, interviews, literature study, and documentation. To gather data, this research involves five informants. The theory used is Ratner's (2012), which includes three indicators: Identification of Barriers and Opportunities, Debate Strategies to Influence, and Planning Collaborative Actions. The results of this study indicate that the poor rural irrigation system is caused by inadequate identification of obstacles and opportunities. Communication between the community and the government regarding the repair of damaged dams is still not well-established. Decision-making needs to be carefully considered in the collaboration process to address the needs and problems faced by farmers. To prevent recurring damage, a routine maintenance system is necessary to ensure the irrigation system is well-maintained. Improvements in irrigation infrastructure must include better and cleaner channels to reduce the risk of blockages due to waste and sedimentation.

Keyword: *Collaborative Governance, Development, Rural Irrigation*

Submisi: 30-11-2024

Diterima: 02-12-2024

Dipublikasikan: 14-02-2025

PENDAHULUAN

Dalam sebuah pembangunan saat ini diperlukan adanya suatu kerja sama yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, hingga akademisi, agar dapat menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan efektif untuk pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan akan memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodir, sehingga pembangunan dapat terjadi secara harmonis dan adil. Kolaborasi juga dapat mempercepat implementasi kebijakan dan program pembangunan, serta menciptakan fungsi pemerintah yang lebih transparan, terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat, dengan demikian *collaborative governance* menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pembangunan yang memadai yang berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

Istilah *Collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash, 2007).

Kolaborasi yaitu suatu kegiatan yang secara fundamental terletak pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial yakni hubungan simpul-simpul komunikasi para pemangku kepentingan. Atas pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kolaborasi yakni analisis dari proses tata kelola dengan sudut pandang pada jaringan sosial. Model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam dialog, dimana para pemangku kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya. Fokus *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara para pemangku kepentingan. *Collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik.

Menurut O'Leary dan Bingham, Kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini didukung oleh Bardach, yang mendefinisikan *collaboration* sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerja sama ditujukan untuk meningkatkan "public value" ketimbang bekerja sendiri-sendiri. *Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung Pemangku kepentingan "non-state" di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset.

Sehubungan dengan pengertian *collaborative governance* dalam pembangunan pengelolaan pengiran di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 pasal 1 ayat (8-9) menjelaskan bahwa pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Rencana pengelolaan sumber daya air hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang di perlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.

Pembangunan desa yang menggunakan *collaborative governance* diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 83 ayat (1) menjelaskan Pembangunan Kawasan Pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten/Kota. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas

pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Desa ini pun telah didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pembangunan pengelolaan pengairan pedesaan sangat berpengaruh pada pendapatan suatu desa maupun negara dikarenakan melibatkan para petani secara langsung, dimana pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama untuk kehidupan para masyarakat yang ada di Desa Bakti Agung Poso Pesisir Utara.

Adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kawasan pedesaan memiliki potensi untuk memajukan desa dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki. Kolaborasi dimulai dari rencana pembangunan yang dibahas oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa bahkan sebaliknya dari desa sampai tingkat pusat melalui sebuah konsesus. Permasalahan yang terjadi dalam konteks ini dilihat dari konsep Collaborative Governance adalah kurang berjalannya sistem konteks yang dilihat dari kondisi perubahan peraturan perundang-undangan, draft yang dilihat dari elemen leadership yang sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan di desa, dan dinamika kolaborasi yang terjadi yaitu kondisi yang tidak menguntungkan semua pihak sehingga masih terjadi ego sektoral. Konsep Collaborative Governance sebagai basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi kawasan pedesaan sebagai sebuah solusi bagi pihak yang akan mengembangkan dan mengimplementasikan kawasan pedesaan dalam bentuk kebijakan atau pun penelitian (Harsanti, Murdiyanto dan Senjawati, 2018).

Pembangunan suatu desa sangat diperlukan adanya collaborative governance karena dalam pembangunan diperlukanya suatu diskusi untuk mencapai suatu tujuan bersama sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan keinginan ataupun hasil keputusan yang telah di diskusikan sebelumnya. Collaborative governance adalah suatu pendekatan di mana pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bekerja sama dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pembangunan desa, collaborative governance menjadi penting karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Collaborative governance memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan desa terjadi dengan cara yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Ini merupakan pendekatan yang mengakui pentingnya keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis bertemu dengan kepala desa bakti agung untuk mengetahui penyebab utama mengapa masyarakat Desa Bakti Agung khususnya para petani kurang partisipasi dalam collaborative pembangunan sistem pengairan, kepala desa bakti agung menyebutkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sistem pengairan dikarenakan masyarakat bakti agung memprioritaskan kegiatan mengurus lahan pertaniannya dari pada mengikuti kegiatan musyawarah dalam membahas pembangunan sistem pengairan, hal ini menyebabkan pembangunan sistem pengairan kurang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sistem Pengairan yang ada di persawahan Desa Bakti Agung adalah sistem pengairan irigasi tetes, untuk lahan pertanian dengan tanaman semusim seperti padi memakai sistem pengairan irigasi tetes dengan jarak tetes sekitar 20-30 cm dan debit air sekitar 2-4 liter per jam per tanaman. Untuk lahan yang lebih luas, biasanya dipasang pipa utama dengan diameter sekitar 20-25 mm. Tanaman seperti padi membutuhkan sistem pengairan yang teratur sehingga memastikan air dapat mencapai seluruh lahan dengan baik, sehingga dapat membuat hasil panen semakin meningkat. Desa Bakti Agung menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan sistem pengairan, terutama terkait dengan ketidakpastian musim, kerusakan bendungan, dan ketidakmerataan distribusi air, serta masih

kurang tepatnya pengambilan keputusan dalam mempertimbangkan hambatan yang sedang di hadapi oleh masyarakat petani sehingga masalah yang ada tidak terselesaikan dengan cepat. Meskipun demikian, terdapat potensi kolaboratif yang kuat di antara para petani dan pemerintah desa untuk mengatasi masalah ini. Petani dan aparat desa telah menunjukkan komitmen dalam merencanakan tindakan kolaborasi yang melibatkan alokasi sumber daya, pembagian tugas, serta partisipasi aktif masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pengairan dengan lebih efisien, meningkatkan kesadaran gotong royong, dan menciptakan solusi sementara untuk tetap mempertahankan produktivitas pertanian.

Berdasarkan Hasil penelitian terdapat beberapa masalah yang mengenai collaborative governance dalam pembangunan sistem perairan di Desa Bakti Agung Poso Pesisir Utara, Selain melihat langsung proses yang mengenai collaborative governance dalam pembangunan sistem perairan di Desa Bakti Agung Poso Pesisir Utara peneliti juga melakukan wawancara kepada Petani sebagai individu yang langsung merasakan hambatan yang ada dilapangan. Berikut permasalahan yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan teori Retnar (2012) dilihat dari hambatan dan peluang yang belum terselesaikan dengan cepat sehingga petani harus mencari solusi sendiri agar lahan peraniannya tetap produktif, Hambatannya sering kali adalah kurangnya informasi yang jelas dari pemerintah. Kadang kami tidak tahu kapan rapat akan dimulai atau bagaimana cara kami bisa terlibat. Selain itu, ada juga masalah pendanaan dan kurangnya alat yang memadai untuk memulai pembangunan sistem pengairan, peluang yang harus di manfaatkan seharusnya pemerintah bisa lebih transparan dan aktif mengadakan sosialisasi. Penggunaan teknologi seperti aplikasi informasi desa bisa membantu. Juga, melibatkan lebih banyak pihak swasta yang mau berinvestasi di bidang pengairan.

METODE

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif.. Definisi konsep dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Ratner, terdiri indikator Identifikasi Hambatan dan Peluang (Identifying Obstacles and Opportunities), Strategi Debat untuk Mempengaruhi (Debating Strategies for Influence), Merencanakan Tindakan Kolaborasi (Planning Collaborative Actions). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan Studi kepustakaan. Instrumen penelitian yaitu alat tulis, alat perekam, alat dokumentasi serta kamera, susunan pertanyaan sebagai pedoman wawancara, dan catatan lapangan. Tahapan yang digunakan dalam analisis data, yaitu kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan collaborative governance dalam pembangunan sistem perairan di Desa Bakti Agung Poso Pesisir Utara, yang disesuaikan dengan teori collaborative governance dalam perfektif administrasi publik menurut Retnar (2012) yang mana teori ini terdapat indikator indikator yang akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur collaborative governance dalam pembangunan sistem perairan di Desa Bakti Agung Poso Pesisir Utara. Berikut adalah indikator collaborative governance Retnar yang akan dijadikan analisis dalam penelitian ini.

Identifikasi hambatan dan peluang adalah proses penting dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Hambatan adalah faktor-faktor internal atau eksternal yang menghambat

pencapaian tujuan atau kemajuan suatu organisasi atau individu. Sementara itu, peluang adalah situasi atau kondisi yang menguntungkan yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan atau meraih kesuksesan. Dalam mengidentifikasi hambatan, penting untuk meninjau secara kritis faktor-faktor yang mungkin menghambat kemajuan, seperti keterbatasan sumber daya, perubahan dalam lingkungan bisnis, atau kurangnya keterampilan atau dukungan. Setelah hambatan diidentifikasi, langkah-langkah dapat diambil untuk mengatasinya atau menguranginya.

Di sisi lain, mengidentifikasi peluang melibatkan penelusuran situasi atau tren yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai keunggulan kompetitif atau menciptakan nilai tambah. Ini bisa berupa perubahan pasar, perkembangan teknologi baru, atau kebutuhan pelanggan yang berkembang. Dengan mengenali peluang ini, organisasi atau individu dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memanfaatkannya. Dalam keseluruhan, identifikasi hambatan dan peluang adalah langkah penting dalam pengelolaan risiko, perencanaan strategis, dan inovasi. Dengan pemahaman yang baik tentang kedua faktor ini, sebuah organisasi atau individu dapat mengoptimalkan potensi mereka untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang ada di Desa Bakti Agung melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah desa serta masyarakat lokal guna memastikan bahwa perencanaan pembangunan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun berdasarkan hasil penelitian, Peneliti menemukan bahwa Desa Bakti Agung mengalami kendala dalam pembangunan infrastruktur Pengairan, yaitu pembangunan Bendungan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran gotong royong dan faktor alam yang tidak menentu sehingga di musim penghujan mengakibatkan bendungan menjadi jebol di karenakan debit air yang melonjak cukup besar dan kesadaran masyarakat akan membuang sampah pada tempatnya mengakibatkan bendungan tersumbat dan menjadi jebol. Berdasarkan hasil wawancara bersama 5 informan dapat di simpulkan bahwa Desa Bakti Agung menghadapi berbagai kendala dalam sistem pengairan, termasuk ketidakpastian musim, kerusakan bendungan, dan kurangnya informasi serta transparansi dari pemerintah. Meskipun ada beberapa upaya perbaikan dan adaptasi yang dilakukan oleh petani, seperti beralih ke tanaman palawija dan meningkatkan komunikasi dalam kelompok tani, masih banyak yang perlu dilakukan. Peningkatan infrastruktur pengairan, manajemen sampah yang lebih baik, penggunaan teknologi informasi, dan keterlibatan pihak swasta merupakan langkah-langkah yang dapat membantu mengatasi masalah ini dan meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Bakti Agung.

Strategi debat untuk mempengaruhi merupakan serangkaian taktik yang digunakan untuk memengaruhi opini, sikap, atau keputusan orang lain melalui sebuah diskusi argumentatif. Salah satu indikator penting dari strategi ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam argumen lawan dan secara efektif mengeksposnya. Ini melibatkan keterampilan dalam membedah dan menilai argumen secara logis serta mengungkapkan kesalahan pemikiran atau premis yang tidak valid. Selain itu, indikator lainnya adalah kemampuan untuk membangun argumen yang kuat dan meyakinkan. Ini mencakup penggunaan data, fakta, dan bukti yang relevan, serta kemampuan untuk merumuskan argumen dengan cara yang logis dan koheren. Strategi ini juga melibatkan kemampuan untuk memahami audiens dan menyampaikan pesan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selain itu, strategi debat untuk mempengaruhi juga mencakup kemampuan untuk merespons secara cepat dan taktis terhadap argumen lawan, baik itu dengan memberikan tanggapan langsung atau dengan mengalihkan perhatian ke aspek-aspek lain dari pembahasan yang lebih menguntungkan. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan pihak lawan serta kemampuan untuk menyesuaikan strategi debat secara dinamis juga merupakan indikator penting dalam mencapai pengaruh yang diinginkan melalui debat. Dengan menggunakan strategi-debat yang efektif, seseorang

dapat secara efektif memengaruhi opini dan keputusan orang lain dalam berbagai konteks, mulai dari politik hingga bisnis dan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara bersama 5 informan dapat disimpulkan bahwa pembangunan dan pemeliharaan sistem pengairan menjadi fokus utama masyarakat desa, terutama para petani. Kepala Desa Bakti Agung, Bapak Eko Prabowo, menekankan pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam musyawarah desa (MUSREMBANGDES) untuk menentukan prioritas pembangunan, termasuk perbaikan bendungan yang jebol. Transparansi dan partisipasi masyarakat juga ditekankan sebagai kunci sukses pembangunan desa.

Merencanakan tindakan kolaborasi adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan dan koordinasi langkah-langkah bersama antara individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan yang sama atau saling menguntungkan. Indikator utama dalam merencanakan tindakan kolaborasi termasuk identifikasi tujuan bersama, alokasi sumber daya yang tepat, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Pertama, identifikasi tujuan bersama menjadi kunci dalam merencanakan kolaborasi yang efektif. Ini melibatkan proses komunikasi dan negosiasi untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang ingin dicapai dan mengapa kolaborasi diperlukan.

Kedua, alokasi sumber daya yang tepat menjadi indikator penting dalam merencanakan tindakan kolaborasi. Ini mencakup penentuan anggaran, waktu, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan kolaboratif dengan lancar dan efisien.

Ketiga, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas membantu memastikan bahwa setiap pihak terlibat dalam kolaborasi memiliki peran yang jelas dan saling melengkapi. Dengan demikian, masing-masing pihak dapat fokus pada tugas mereka sendiri dan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama.

Melalui penggunaan indikator ini, sebuah inisiatif kolaboratif dapat diarahkan dan dieksekusi dengan lebih efektif, memungkinkan tercapainya hasil yang lebih optimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama 5 informan dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan para petani sangat penting untuk mengatasi masalah pengairan dan mendukung pembangunan desa. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya menangani permasalahan jangka pendek tetapi juga memberikan solusi yang memungkinkan para petani terus berproduksi dan mendukung keberlangsungan ekonomi mereka. Transparansi, partisipasi aktif, dan komunikasi yang jelas adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan di Desa Bakti Agung.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan serta hasil penelitian yang dilakukan Peneliti memberikan kesimpulan bahwa di Desa Bakti Agung memiliki beberapa hambatan, seperti ketidakpastian musim, kerusakan bendungan, dan ketidakmerataan distribusi air. Hambatan tersebut dapat di atasi dengan berapa peluang yang dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman yang tidak terlalu berpengaruh dengan musim yang berubah-ubah, dengan tanaman yang tidak memerlukan air yang begitu banyak agar mata pencaharian petani di Desa Bakti Agung terus berlanjut, tetapi masih kurang tepatnya pengambilan keputusan dalam mempertimbangkan hambatan yang sedang di hadapi oleh masyarakat petani sehingga masalah yang ada tidak terselesaikan dengan cepat. Meskipun demikian, terdapat potensi kolaboratif yang kuat di antara para petani dan pemerintah desa untuk mengatasi masalah ini.

Petani dan aparat desa telah menunjukkan komitmen dalam merencanakan tindakan kolaborasi yang melibatkan alokasi sumber daya, pembagian tugas, serta partisipasi aktif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. 2008. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-571.
- Ansell, Chris dan Gash, Alison. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 18, Issue 4, Pages 543–571. DOI: <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Bingham, L. B., & O'Leary, R. (2008). *Big Ideas in Collaborative Management*. New York: Sharpe.
- Harsanti, Febtory Setyo., Murdiyanto, Eko., dan Senjawati, Nanik Dara. 2018. Model Perencanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Di Desa Kebon Gunung, Purworejo. *Jurnal Dinamika Sosisal Ekonomi* . Volume 19, Nomor 1. Hal. 31-38. DOI: <https://doi.org/10.31315/jdse.v19i1>
- Ratner. 2012. *Collaborative Governance Assessment*. Malaysia: CGIAR.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

TENTANG PENULIS

1. Identitas Pribadi

- 1) Nama : Ahmad Rifai
- 2) Nomor Induk Mahasiswa : B 101 20 011
- 3) Tempat dan Tanggal Lahir : Tambarana, 24 Agustus 2001
- 4) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5) Agama : Islam
- 6) Alamat : Jl. Hangtuah, Lrg. Bukit Sofa, Kel. Palu Timur, Kota Palu
- 7) Nomor Telepon : 081243777992
- 8) Alamat Email : calonsuami865@gmail.com

2. Identitas Orang Tua

- 1) Ayah : Al Ikhsan
- 2) Ibu : Hadija

3. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Lulus
1	SD	SDN 2 Tambarana	2014
2	SMP	SMP Negeri 2 Poso Pesisir Utara	2017
3	SMA	SMA Negeri 1 Poso Pesisir Utara	2020
4	Perguruan Tinggi	Prodi. Administrasi Publik Fisip Universitas Tadulako	2024